

**SKRIPSI**  
**PROSES POLITIK PEMILIHAN KETUA DPD II PARTAI GOLKAR KOTA**  
**MAKASSAR TAHUN 2021**



**OLEH :**  
**ANDI MAULIYA AULIYA**

**E041181302**

**DEPARTEMEN ILMU POLITIK**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : ANDI MAULIYA AULIYA  
NIM : E041181302  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)  
Program Studi : ILMU POLITIK

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Proses Politik Pemilihan Ketua DPD II Partai Golkar Kota Makassar Tahun 2021" adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 29 Juni 2022



(ANDI MAULIYA AULIYA)

**HALAMAN PENERIMAAN**

**SKRIPSI**

**PROSES POLITIK PEMILIHAN KETUA DPD II PARTAI GOLKAR  
KOTA MAKASSAR TAHUN 2021**

Disusun dan Diajukan Oleh :

**ANDI MAULIYA AULIYA**

**E041181302**

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh Panitia Ujian Skripsi  
pada Departemen Ilmu Politik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Menyetujui,

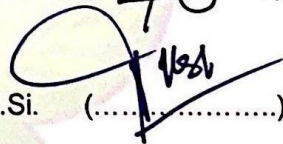
**PANITIA UJIAN**

Ketua : Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si.

Sekretaris : Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP., M.Si.

Anggota : Drs. H. Andi Yakub, M.Si., Ph.D.

Anggota : Ummi Suci Fathia B., S.IP., M.IP.



**HALAMAN PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**PROSES POLITIK PEMILIHAN KETUA DPD II PARTAI GOLKAR  
KOTA MAKASSAR TAHUN 2021**

Disusun dan Diajukan Oleh :

**ANDI MAULIYA AULIYA**

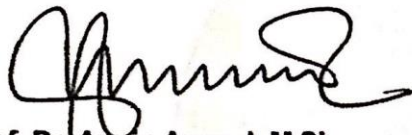
**E041181302**

Dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi

Pada tanggal : 7 Juli 2022

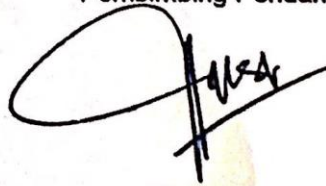
Menyetujui,

Pembimbing Utama



**Prof. Dr. Amin Ahsyad, M.Si.**  
NIP. 19730813 199802 2 001

Pembimbing Pendamping



**Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP., M.Si.**  
NIP. 19730813 199802 2 001

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Politik



**Drs. H. Andi Yakub, M.Si., Ph.D.**  
NIP. 19621231 199003 1 023

## ABSTRAK

**Andi Mauliya Auliya E041181302. Proses Politik Pemilihan Ketua DPD II Partai Golkar Kota Makassar Tahun 2021. Dibawah bimbingan Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si. sebagai Pembimbing Utama dan Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP., M.Si sebagai Pembimbing.**

---

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa Appi terpilih menjadi ketua DPD II Partai Golkar Kota Makassar serta untuk menjelaskan apakah terjadi faksionalisasi dalam pemilihan Ketua DPD II Partai Golkar Kota Makassar. Lokasi penelitian dilaksanakan di kantor Partai Golkar Makassar yang berada di Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, alasan Munafri Arifuddin terpilih sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Kota Makassar dilatar belakangi oleh popularitas Munafri Arifuddin dimata masyarakat Kota Makassar. Dua kali mencalonkan sebagai Walikota di Pilwalkot membuat nama Munafri Arifuddin semakin dikenal oleh masyarakat Kota Makassar. selain itu, Munafri Arifuddin merupakan CEO PSM Makassar. Selain itu, dukungan elite Partai Golkar ditingkat pusat dan provinsi dalam membentuk penerbitan diskresi sebagai penggugur syarat keanggotaan partai minimal 5 tahun yang dikeluarkan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dengan rekomendasi ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan Taufan Pawe. Kedua, faksionalisasi yang melebur mendukung keterpilihan Munafri Arifuddin sebagai ketua DPD II Golkar Kota Makassar. Hingga akhirnya sebelum Musda dimulai Juniar Arge memutuskan untuk mundur dalam pencalonan. Ditambah dukungan oenuh dari 12 pemilik suara di Musda Partai Golkar Kota Makassar kepada munafri Arifuddin. Dukungan ini selain sebagai bentuk kepercayaan kepada Munafri sebagai ketua Partai Golkar Kota Makassar, dukungan ini juga sebagai langkah kader Internal Partai Golkar Kota Makassar menghindari konflik pasca Musda karena ekstremnya faksi yang ada.

**Kata Kunci : Politik, Pemilihan Ketua, Faksionalisasi**

## **ABSTRACT**

**Andi Mauliya Auliya E041181302. Proses Politik Pemilihan Ketua DPD II Partai Golkar Kota Makassar Tahun 2021. Under the guidance of Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si. as Principal Advisor and Dr. Gustana A. Kambo, S.IP., M.Si as Advisor.**

---

This study aims to explain why Appi was elected as chairman of the Makassar City Golkar Party DPD II and to explain whether there was factionalization in the election of Makassar City Golkar Party DPD II chairman. The location of the research was carried out at the Makassar Golkar Party office in Makassar City. The type of research used is qualitative research with descriptive research type. Data collection techniques in this study were interviews and documentation.

The results of this study indicate that first, the reason why Munafri Arifuddin was elected as Chairman of the DPD II Golkar Party of Makassar City was motivated by the popularity of Munafri Arifuddin in the eyes of the people of Makassar City. Twice to nominate as Mayor in the Pilwalkot election made Munafri Arifuddin's name increasingly known to the people of Makassar City. In addition, Munafri Arifuddin is the CEO of PSM Makassar. In addition, the support of the Golkar Party elite at the central and provincial levels in forming a discretionary issuance as a waiver of the party membership requirement of at least 5 years was issued directly by the General Chairperson of the Golkar Party, Airlangga Hartarto, with the recommendation of the chairman of DPD I of the South Sulawesi Golkar Party, Taufan Pawe. Second, the fused factionalization supported the election of Munafri Arifuddin as chairman of the DPD II Golkar Makassar City. Until finally, before the Musda started, Juniar Arge decided to withdraw his candidacy. Plus the full support of 12 voice owners in the Makassar City Golkar Party Musda to the munafri Arifuddin. This support is not only a form of trust in Munafri as chairman of the Makassar City Golkar Party, this support is also a step for internal cadres of the Makassar City Golkar Party to avoid conflict after the Musda due to the extremes of the existing factions.

**Keyword : Politics, Election of Chair, Facialization**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamualaikum Wr.Wb*

Segala puji dan syukur penulis panjatkan bagi Tuhan Yang Maha Esa karena atas kasih karunia dan anugerah-Nya yang melimpah, penulis akhirnya mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Proses Politik Pemilihan Ketua DPD II Partai Golkar Kota Makassar Tahun 2021**”. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat wajib sebagai mahasiswa strata satu (S1), untuk menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana Ilmu Politik (S. IP) pada Program Studi Ilmu Politik, Departemen Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua terkasih, Ayah **Yamin Walinono** dan Ibu **Putry Djohar** yang telah merawat, membesarkan, dan mendidik penulis. Kepada saudara penulis **Andi Gayatri Putri Paundra, Andi Natoya Nuraisyah dan Andi Triya Annisa**, tante saya **Andi Nursanti Walinono** sebagai orang yang selalu memberikan perhatian khusus terkait urusan perkuliahan penulis, tante **Dija Taufik** yang selalu mengurus penulis, dan seluruh keluarga besar **Andi Hasan Walinono** serta **Andi Djamerro** yang tidak sempat disebutkan satu persatu, terima kasih juga atas semua dukungan, motivasi, perhatian serta doanya.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak **Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si.** dan **Ibu Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP, M.Si.** selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu, memberikan arahan, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran, dalam membimbing penulis menyusun skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa banyak pihak telah memberikan petunjuk dan bantuan bagi penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini, untuk itu pada kesempatan ini, penulis juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. **Ibu Prof. Dwi Aries Tina Palubuhu, MA** selaku rektor Universitas Hasanuddin periode 2014-2022 yang telah memberikan perubahan positif bagi sistem pendidikan di Universitas Hasanuddin dan bapak **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc** selaku rektor Universitas Hasanuddin periode 2022-sekarang.
2. Bapak **Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si,** selaku Dekan FISIP UNHAS yang telah memberi ruang pada penulis di lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
3. Bapak **Dr. Phil. Sukri, M.Si, Dr. Suparman Abdullah, M.Si,** dan **Dr. Hasrullah, M.Si** selaku Wakil Dekan FISIP UNHAS yang telah memberikan kemudahan terhadap penulis dalam urusan akademik dan kemahasiswaan.



4. Bapak **Drs. H. Andi Yakub, M.Si, Ph.D**, selaku Ketua Departemen Ilmu Politik yang telah menjadi orang tua penulis di kampus selama perkuliahan dan membantu kelancaran administrasi akademik.
5. Seluruh dosen-dosen Program Studi Ilmu Politik : Bapak **Prof. Dr. Muhammad, M.Si**, Bapak **Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si**, Bapak **Prof. Dr. H. Basir Syam, M.Ag (Alm)**, Bapak **Drs. A. Yakub, M.Si**, Bapak **Dr. Muhammad Saad, MA**, Bapak **Andi Naharuddin, S.IP, M.Si**, Bapak **Andi Ali Armunanto, S.IP, M.Si**, Bapak **Dr. Phil. Sukri, M.Si**, Ibu **Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si**, Ibu **Dr. Ariana Yunus S.IP, M.Si**, Bapak **Dr. Imran, S.IP, M.Si**, Ibu **Sakinah Nadir, S.IP, M.Si**, Ibu **Ummi Suci Fathya Bailusy, S.IP, M.Si**, Bapak **Zulhajar, S.IP, M.Si**, dan Ibu **Dian Ekawati, S.IP, M.Si** yang senantiasa mencurahkan segenap ilmu, arahan dan motivasi kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
6. Seluruh Staf Akademik Departemen Ilmu Politik yang telah memberikan bantuan jasa dalam bidang administrasi selama penulis menjadi mahasiswa.
7. Terimakasih kepada bapak Alm. Irianto Ahmad dan kak aat yang telah banyak membantu peneliti dalam mengurus kepentingan peneliti di Partai Golkar, serta kepada anggota Partai Golkar lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

8. Terima kasih kepada sahabat – sahabat SMA saya **@indrianisyrf**, **@dhiny.salsabia**, **@rezkyamaliar**, **@azheilaa**, **@ismi**, **@muh\_fauzan**, yang telah menjadi tempat berbagi tawa, keluh kesah dan semua kisah unik serta “rumah” bagi Penulis.
9. Terima kasih kepada Sahabat – Sahabat kuliah saya **@andiamirahdh**, **@anggy mulia**, **@andibatarii09**, **@nurulshintha**, yang telah menjadi keluarga, sahabat, saudara, senasib dan seperjuangan dalam menggapai gelar S1 Ilmu Politik.
10. Terimakasih kepada kakak **Fichri** yang banyak membantu dalam kelancaran skripsi saya ini.
11. Seluruh teman **Ilmu Politik angkatan 2018** yang telah bersama dari mahasiswa baru hingga sekarang.
12. Sahabat saya di KKN Gel 106 Unhas Wilayah Rappocini 1 khususnya **@ainunrezky07**, **@\_nuryanti** terima kasih atas kebersamaan, kerja sama dan kenangan selama KKN.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat atas amalan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Makassar, 29 Juni 2022

(ANDI MAULIYA AULIYA)

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Konsep Aktor Politik.....	10
2.2 Jaringan Aktor.....	15
2.3 Faksiinalisasi Partai.....	17
2.3.1 Definisi Faksionalisasi.....	17
2.3.2 Penyebab Faksionalisasi.....	19
2.3.3 Dampak Faksionalisasi.....	21
2.4 Kerangka Pikir.....	22
2.5 Skema Pemikiran.....	24
2.6 Peneliti Terdahulu.....	25

BAB III METODE PENELITIAN.....	27
3.1 Lokasi Penelitian .....	27
3.2 Tipe dan Jenis Penelitian .....	27
3.3 Jenis Data dan Sumber Data .....	28
a. Data Primer.....	28
b. Data Sekunder .....	28
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	28
a. Wawancara .....	29
b. Dokumentasi.....	29
3.5 Teknik Analisis Data.....	30
a. Reduksi Data .....	30
b. Penyajian Data.....	31
c. Kesimpulan .....	31
 BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....	 32
4.1 Sejarah Partai Golkar.....	32
4.2 Faksi dalam Kepemimpinan Partai Golkar dari Masa ke Masa .....	36
4.3 Gambaran Partai Golkar .....	38
4.3.1 Tujuan dan Fungsi Partai Golkar.....	38
4.3.2 Lambang dan Tanda Gambar Partai .....	40
4.3.3 Visi dan Misi Partai Golkar .....	41
4.3.4 Platform Partai Golkar .....	42
4.4 Partai Golkar DPD II Kota Makassar.....	45
 BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	 48
5.1 Terpilihnya Munafri Arifuddin sebagai Ketua DPD II Golkar Kota Makassar.....	48
5.1.1 Pengalaman Munafri Arifuddin dalam Konteks Pilwalkot Kota Makassar Tahun 2018 dan 2020 .....	50
5.1.2 Jejaring yang baik dengan Partai lain.....	52
5.1.3 Basis Massa Munafri Arifuddin yang jelas di Masyarakat.....	55

5.1.4 Munafri Arifuddin dianggap sebagai Representatif Milenial..	59
5.1.5 Kedekatan Munafri Arifuddin dengan Elite Partai Golkar Provinsi dan Pusat .....	62
5.2 Faksionalisasi dalam Pemilihan Ketua DPD II Golkar Kota Makassar.....	67
5.2.1 Terbentuknya 4 Faksi setelah 4 Bakal Calon Ketua Mengambil Formulir Ketua DPD II Kota Makassar.....	69
5.2.2 Persaingan antara 2 Faksi Besar Memperebutkan Posisi Ketua DPD II Kota Makassar .....	73
5.2.3 Seluruh Pimpinan Kecamatan dan Organisasi Sayap Memberikan Dukungan Kepada Munafri Arifuddin.....	77
BAB VI PENUTUP .....	85
6.1 Kesimpulan .....	85
6.2 Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA .....	88
LAMPIRAN .....	93

## DAFTAR TABEL

**Tabel 4.1 Daftar Ketua Umum Golkar**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan Negara Demokrasi, dalam sebuah Negara Demokrasi membutuhkan Partai Politik yang berperan sebagai wadah bagi individu untuk menggapai kekuasaan. Partai Politik mempunyai posisi dan peran yang sangat penting dalam setiap demokrasi.<sup>1</sup> Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Keberadaan partai politik merupakan manifestasi dari kehendak (aspirasi) politik rakyat. Partai politik dapat dimaknai sebagai organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum.

Partai politik memerlukan yang namanya pemimpin atau ketua. Eksistensi dan kemajuan sebuah Partai Politik dipengaruhi oleh etos dari ketua partai politik itu sendiri. Kegiatan pemilihan ketua partai secara langsung merupakan salah satu perwujudan dari pelaksanaan kedaulatan suara anggota partai dalam rangka penyelenggaraan demokrasi, dengan pemilihan secara langsung maka anggota diberikan pengakuan untuk berperan secara aktif dalam menentukan wujud penyelenggaraan

---

<sup>1</sup> Miriam Budiardjo:2008 *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm 401.

organisasi partai tersebut. Pemilihan ketua partai secara langsung oleh anggota partai berfungsi sebagai sarana penyampaian hak-hak demokrasi.

Pemilihan ketua DPD Partai Golkar Makassar sebagai sarana perwujudan kedaulatan anggota partai, sekaligus juga merupakan arena kompetisi yang paling adil bagi para calon ketua untuk menunjukkan visi, misi dan program kerja, serta bagaimana kelak jika dirinya dipilih dapat menjalankan fungsi, peran partai dan bertanggungjawab atas kinerja partai.

Adapuan pergantian kepengurusan dalam Partai Golkar di tingkat Daerah

dilakukan melalui Musyawarah Daerah (Musda). Musyawarah Daerah

didalam Partai Makassar Golkar adalah forum pengambilan keputusan tertinggi Partai Golkar tingkat daerah yang berfungsi sebagai media untuk mengevaluasi kinerja partai dan pengurus tingkat daerah yang diselenggarakan setiap lima tahunan, sekaligus juga untuk memilih kembali ketua baru untuk periode selanjutnya.

Musyawarah daerah yang dilaksanakan, menggunakan musyawarah dalam rangka evaluasi kepengurusan pemimpin partai Golkar di tingkat DPD serta kemudian memilih ketua baru untuk kepengurusan partai Golkar berikutnya. Dalam Musda sebuah partai, proses pemilihan ketua DPD partai memiliki sebuah dinamika tersendiri yang menarik untuk dikaji, termasuk diantaranya dalam Musda DPD II Partai Golkar Kota Makassar. Salah satu yang menarik untuk dikaji dalam penelitian adalah pada pra penelitian diketahui bahwa Appi dianggap memiliki dukungan luar biasa dari berbagai kalangan. Adanya potensi dukungan dari berbagai



kalangan tidak mungkin akan tercapai jika seandainya tidak ada komunikasi politik yang baik dari Munafri Arifuddin.

Sehubung dengan hal diatas, pada tanggal 9 Maret 2021, DPD II Partai Golkar Kota Makassar memutuskan Munafri Arifuddin atau akrab yang disapa Appi dipilih secara aklamasi.<sup>2</sup> Ia dipilih secara aklamasi usai lawannya Juniar Arge memutuskan untuk mengundurkan diri setelah ditetapkan menjadi calon. Jalan mulus Appi sebagai nahkoda Golkar Makassar ia dapatkan usai menerima diskresi dari Ketua Umum (Ketum) Arlangga Hartarto. Peralnnya, Appi ialah kader baru dan belum lima tahun menjadi pengurus.<sup>3</sup>

Salah satu fenomena yang menarik dalam partai politik, tentunya ada dalam konteks pengelompokan atau faksionalisasi. Dimana faksionalisasi didalam sebuah partai sering terjadi pada saat pemilihan ketua partai. Faksionalisasi tidak bisa dihindari karena suatu organ bisa eksis bukan karena ideologi atau relasi dengan anggota partai yang membentuknya, tapi justru karena hidupnya faksi-faksi yang lahir secara alamiah di dalam partai politik. Terjadinya faksionalisasi juga tidak hanya disebabkan oleh kontrol pimpinan yang lemah, tapi juga disebabkan oleh tiga faktor yaitu ideologi, kepemimpinan partai dan karakter patronase.

---

<sup>2</sup> Sanusi, Muhaimin.2021. "Appi Terpilih Secara Aklamasi Pimpin Golkar Makassar"  
<https://makassar.sindonews.com/read/358934/710/appi-terpilih-secara-aklamasi-pimpin-golkar-makassar-1615269803>, diakses pada 10 Februari 2021 pukul 10.27

<sup>3</sup> Sanusi, Muhaimin. 2021. "Terpilih Aklamasi,, Munafri Arifuddin Ketua Golkar Makassar",  
<https://sulsel.inews.id/berita/terpilih-aklamasi-munafri-arifuddin-ketua-golkar-makassar>, diakses pada 10 Februari 2021 pukul 10.45

Mencermati dinamika politik pada saat pencalonan pemilihan ketua DPD II Partai Golkar Makassar, terdapat empat faksi yang bersaing dengan calon utama untuk merebut kursi ketua DPD Partai Golkar Makassar. Faksi pertama adalah faksi yang mendukung Andi Nurhaldin N.H dengan orientasi untuk meningkatkan suara pada pileg 2024 yang akan mendatang. Faksi kedua adalah faksi yang mendukung Fadil Resky Noer Roid dengan orientasi untuk meningkatkan kaum milenial didalam partai politik khususnya Partai Golkar Makassar. Faksi ketiga adalah faksi yang mendukung Munafri Arifuddin dengan orientasi untuk mengembalikan kejayaan Partai Golkar Makassar. Faksi keempat adalah faksi yang mendukung Juniar Arge dengan orientasi untuk membawa partai kearah yang lebih baik. Tetapi diketahui bahwa pada saat pengembalian formulir hanya terdapat dua calon saja yang mengembalikan formulir tepat waktu yaitu Juniar Arge dan Munafri Arifuddin. Maka dari hal tersebut bahwa yang dari mulanya terdapat empat faksi menjadi dua faksi saja.

Ada beberapa hal yang melatar belakangi hal tersebut diantaranya adalah adanya perbedaan kepentingan politik elit partai dalam menentukan ketua DPD II Partai Golkar Makassar, sehingga berdampak pada pembentukan faksi yang begitu tajam di internal DPD II Partai Golkar Makassar. Ada yang memilih untuk mendukung kubu Munafri Arifuddin dan lainnya memilih untuk mendukung Juniar Arge. Namun, diketahui bahwasanya saat telah ditetapkan menjadi calon kandidat ketua DPD II Partai Golkar Kota Makassar Juniar Arge memilih untuk mengundurkan diri

lalu kemudian Munafri Arifuddin atau yang akrab disapa dengan Appi dipilih secara aklamasi.

Faksionalisasi yang terjadi di DPD II Partai Golkar Makassar jika dianalisis berdasarkan perpektif teori karakteristik faksionalisasi. Pada awalnya termasuk kedalam faksionalisasi kompetitif, dapat dilihat faksionalisasi yang terjadi muncul ketika ada perbedaan pendapat, konflik kepentingan, dan perebutan jabatan Ketua DPD II Partai Golkar Makassar. Adanya perebutan jabatan Ketua DPD II Partai Golkar Makassar menghadirkan gaya politik sentrifugal dan fragmentasi yang semakin mengeraskan perkubuan di dalam DPD II Partai Golkar Makassar. Faksionalisasi kompetitif dipahami sebagai suatu pola yang bersifat sementara dan taktis, sehingga jika melihat sifat dari faksionalisasi yang terjadi di internal DPD II Partai Golkar Makassar tidak lama dan hanya terjadi pada isu-isu tertentu. Setelah adanya intervensi dari beberapa pihak mengenai pemilihan Ketua DPD II Partai Golkar Makassar, seluruh kubu yang pada awalnya saling bersaing akhirnya menyatu dan menerima rekomendasi untuk menunjuk Munafri Arifuddin sebagai ketua DPD II Partai Golkar Makassar. Faksionalisasi di DPD II Partai Golkar Makassar tidak termasuk dalam bentuk kooperatif karena dalam hal ini tidak memberikan ruang maupun memfasilitasi pengelompokkan faksi diantara anggotanya. Sehingga dinamika diantara faksi lebih bersifat kompetitif.

Ketika melihat dari dinamika partai, maka sosok yang dapat mendukung pimpinan pusat yang akan menang. Tapi kalau pendekatan

demokratis, yang menang adalah sosok yang mendapat dukungan dari pemegang suara di daerah, yakni DPD II Partai Golkar. Jika pemilihan dalam musda mengakomodir suara dari daerah, maka musda itu mempertimbangkan sirkulasi kepemimpinan dari daerah. Artinya semua bakal calon yang telah muncul memiliki peluang yang sama untuk terpilih menjadi Ketua DPD Partai Golkar Makassar.

Hal tersebut berdasarkan petunjuk pelaksana (Juklak) No 5/2016 partai Golkar yang mengatur proses pencalonan kader menjadi Ketua Partai Golkar di masing-masing tingkatan. Berikut peraturan dasar partai Golkar yang tercantum pada (Juklak) No 5/2016 Pasal 50;

1. Pemilihan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, Ketua Pimpinan Kecamatan, dan Ketua Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain dilaksanakan secara langsung oleh Peserta Musyawarah;
2. Pemilihan dilaksanakan melalui tahapan Penjaringan, Pencalonan dan Pemilihan;
3. Ketua Umum atau Ketua Terpilih ditetapkan sebagai Ketua Formatour;
4. Penyusunan Pengurus Dewan Pimpinan/Pimpinan Partai dilakukan oleh Ketua Formatour dibantu beberapa orang Anggota Formatour;
5. Tata Cara Pemilihan Dewan Pimpinan/Pimpinan Partai sebagaimana tercantum pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dalam Pasal ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tersendiri.

Julkak tersebut juga mengisyaratkan 11 poin diantaranya, setiap calon harus mendapat dukungan sekurang-kurangnya 30 persen dari pemegang hak suara. Harus aktif menjadi kader Partai Golkar sekurang-kurangnya 5 tahun. Kemudian, tidak mempunyai hubungan suami, istri, atau kekeluargaan sedarah dalam satu garis lurus ke atas dan ke bawah yang duduk sebagai anggota DPR-RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota mewakili partai politik lain atau menjadi pengurus partai lain dalam satu wilayah yang sama. Dalam hal ini jika terdapat kader Partai Golkar yang akan maju sebagai calon Ketua, tapi tidak memenuhi kriteria diatas, maka calon tersebut harus mendapatkan persetujuan dari DPP Partai Golkar.

Namun realita yang terjadi bahwasanya ternyata Munafri Arifuddin tidak memenuhi kriteria-kriteria tersebut, namun yang menarik dalam hal ini bagi peneliti adalah Munafri Arifuddin akhirnya terpilih menjadi Ketua DPD II Partai Golkar Makassar walaupun tidak memenuhi standar kriteria syarat sebagai calon Ketua DPD. Faksionalisasi yang terjadi adalah kelompok-kelompok yang sebelumnya bukan bagian dari pendukung Munafri Arifuddin, beralih mendukung Munafri Arifuddin karena mereka menganggap calon yang mereka usungkan belum mampu untuk bersaing.

Dalam hal ini mereka menganggap kapasitas dan kapabilitas Munafri Arifuddin menjadi ketua lebih besar peluangnya, sehingga mereka memilih mundur dengan mengurungkan niat dengan beberapa pertimbangan yaitu visi dan misi yang sama Appi memiliki cita-cita memajukan Partai Golkar

menjadi lebih baik. Merekrut kader-kader yang memiliki potensi lebih, serta ingin memajukan partai Golkar dalam pileg di 2024 yang akan mendatang. Nah itu semua sesuai dan sejalan dengan cita-cita dengan faksi-faksi yang sebelumnya bukan pendukung Munafri Arifuddin akhirnya meleburkan diri.

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Mengapa Munafri Arifuddin (Appi) dapat terpilih menjadi ketua DPD II Golkar Makassar ?
2. Bagaimana faksionalisasi dalam mendukung terpilihnya Munafri Arifuddin menjadi Ketua DPD II Partai Golkar Makassar ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan penelitian sebagai berikut :

- 1) Untuk menjelaskan mengapa Appi terpilih menjadi ketua DPD II Partai Golkar Makassar;
- 2) Untuk menjelaskan apakah terjadi faksionalisasi dalam pemilihan Ketua DPD II Partai Golkar Makassar

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Secara garis besar penelitian ini terdiri dari dua manfaat utama, yakni berikut:

#### A. Manfaat Akademik

1. Menambah wawasan mahasiswa/i Ilmu Politik dan dapat bermanfaat bagi pengembang ilmu pengetahuan pada umumnya, dan bermanfaat bagi pengembang ilmu pengetahuan terkhususnya Ilmu Politik;
2. Dapat dijadikan sebagai sumber atau referensi bagi siapa saja yang ingin melakukan penelitian serupa.

#### B. Manfaat Praktis

1. Memberikan informasi kepada masyarakat untuk menambah wawasan mengenai fenomena pemilihan Ketua DPD II Partai Golkar Makassar;
2. Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Ilmu Politik.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, menjelaskan atau menguraikan mengenai konsep dan teori yang erat kaitannya dengan penelitian ini mengenai Proses Politik Pemilihan Ketua DPD II Partai Golkar Makassar yang akan dijadikan sebagai kerangka pikiran dalam pembahasan selanjutnya.

#### 2.1 Konsep Aktor Politik

Pendefinisian tentang Aktor yang dikemukakan oleh Brian McNair bahwa aktor politik merupakan individu-individu yang bercita-cita melalui sarana institusi dan organisasi, berkeinginan untuk mempengaruhi proses pembuatan keputusan. Mereka berupaya melakukannya dengan cara mendapatkan kekuasaan politik kelembagaan, baik lembaga eksekutif, maupun legislatif, dimana kebijakan-kebijakan yang terpilih bisa diimplementasikan.<sup>4</sup>

Linz dan Stephan menyebutkan bahwa arena politik ditandai oleh hadirnya empat aktor utama yaitu pertama, *the state* yang dalam berbagai literatur ditempatkan sebagai *public agency*. Kedua, *political society*, yang di dalamnya terdapat partai politik. Ketiga, *economic society*, yang selalu bergerak dalam logika-logika kapital dan pasar.

---

<sup>4</sup> McNair, Brian. 2003. *An Introduction To Political Communication*. New York: Rotledge. hlm 5



Keempat, *civil society*, yang memiliki karakteristik keswadayaan (voluntarisme) dan mandiri dari pengaruh negara.<sup>5</sup>

Menurut Isaac, orang-orang yang terlibat dalam politik biasanya digambarkan sebagai aktor utama dan aktor pendukung. Aktor utama biasanya adalah mereka yang menggunakan kekuasaan dan kontrol pemerintah yang terlembaga (anggota parlemen, presiden, hakim, dan partai politik yang anggotanya berada di lembaga-lembaga tersebut). Aktor pendukung adalah massa, yaitu masyarakat yang aktivitas politiknya direduksi pada kegiatan pemungutan suara setiap tahunnya. Melalui pemilihan umum orang-orang melegitimasi kekuasaan aktor utama, mewakilkan kekuasaannya dan akhirnya kehilangan kekuasaan mereka.

Dalam beberapa cara, hubungan antara aktor utama dan aktor pendukung mungkin dapat dibandingkan dengan aktor panggung dan penontonnya.<sup>6</sup> Ada pihak yang memerintah, ada pula yang menaati pemerintah, yang satu mempengaruhi, yang lain menentang, dan hasilnya berkompromi, yang satu menjanjikan yang lain kecewa karena janji tidak dipenuhi; berunding dan tawar-menawar, yang satu memaksakan putusan berhadapan dengan pihak lain yang mewakili kepentingan rakyat yang berusaha membebaskan. Yang satu menutupi

---

<sup>5</sup> Linz, Juan J. dan Alfred Stephan. 1996. *Problems of Democratic Transition and Consolidation*. USA: Johns Hopkins University. Press. hlm 335

<sup>6</sup> Prilleltensku, Isaac dan Dennis Fox. 2005. *Psikologi Kritis*, Jakarta: Teraju, hlm 216

kenyataan yang sebenarnya (yang merugikan masyarakat atau akan memermalukan), pihak lain berupaya memaparkan kenyataan yang sesungguhnya, dan mengajukan tuntutan, memperjuangkan kepentingan, mencemaskan apa yang terjadi.

Ramlan Surbakti memaparkan salah satu tipe aktor politik yang memiliki pengaruh dalam proses politik adalah pemimpin politik dan pemerintah<sup>7</sup>. Kepemimpinan menjadi bagian dari kekuasaan, tetapi tidak sebaliknya. Mirip dengan kekuasaan, kepemimpinan merupakan suatu hubungan antara pihak yang memiliki pengaruh dengan orang yang dipengaruhi, dan juga merupakan kemampuan menggunakan sumber pengaruh secara efektif. Berbeda dengan kekuasaan yang terdiri atas banyak jenis sumber pengaruh, kepemimpinan lebih menekankan pada kemampuan menggunakan persuasi untuk memengaruhi pengikut.

Politik adalah proses yang didasarkan pada hubungan konflik dan konsensus di antara individu yang saling bergantung dan aktor dalam institusi. Oleh karena itu, pilihan politik selalu berkaitan dengan interaksi antar aktor. Dengan cara ini, setiap langkah perhitungan berikutnya meningkatkan waktu dan jumlah kemungkinan solusi dari masalah pilihan. Aktor dalam mencoba menghitung keputusan mereka menggunakan kemampuan kognitif dan fungsional rasionalitas yang cukup cepat karena hubungan saling ketergantungan mereka.

---

<sup>7</sup> Surbakti, Ramlan. 2010. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Grasindo. hlm 170

Sementara itu gagasan tentang bagaimana pilihan tertentu memengaruhi realisasi tujuan yang diinginkan tampak sangat spekulatif, karena hal itu tidak hanya bergantung pada kecukupan kebijakan dan konsep tetapi juga tentang bagaimana aktor lain akan bereaksi terhadap tindakannya sendiri. Ini tidak hanya menyebabkan beragamnya pilihan, tetapi juga dapat menghasilkan argumen sejauh mana hubungan timbal balik dari perhitungan pilihan antar aktor yang bersangkutan.<sup>8</sup>

Dalam konteks institusi, institusi menentukan aturan main dan memberikan pilihan individu bagi para aktor di bawah aturan tersebut. Institusi membatasi pilihan dan membuat tindakan lebih dapat diprediksi. Meski begitu, institusi juga dapat meningkatkan peluang aktor untuk interaksi strategis dan konsekuensial. Institusi politik memberikan hak dan membebankan kewajiban kepada aktor. Aktor politik menjadi subjek dari arena konflik, kepemimpinan politik, ideologi, dan penetapan tujuan. Institusi menentukan kapasitas aktor politik untuk bertindak dan berinteraksi satu sama lain. Dengan demikian, institusi tidak sepenuhnya menentukan tindakan politik, melainkan menyisakan ruang bagi pilihan-pilihan strategis bagi para aktor.<sup>9</sup>

Upaya aktor untuk memilih secara rasional akan meninggalkan aktor dengan perhitungan yang tak ada habisnya untuk dilakukan. Di luar

---

<sup>8</sup> Scharpf, Fritz W. 1991. *Crisis and Choice in European Social Democracy*. Cambridge: Cambridge University Press. hlm 578

<sup>9</sup> Kaare, Strom. 1990. *Minority Government and Majority Rule*. Cambridge: Cambridge University Press. hal. 165

tingkat tertentu, ini akan sangat tidak efisien karena meningkatnya biaya pengambilan keputusan yang tak terhindarkan. Bagaimanapun, secara teoritis berarti bahwa tindakan manusia tidak terhitung. Namun demikian, para aktor memang ingin memberikan arti khusus pada pilihan mereka. Ini adalah prosedur interpretasi rasional (diri). Aktor juga berasumsi bahwa ada makna dalam pilihan aktor lain dan, karenanya, menafsirkan pilihan ini sesuai dengan itu.

Sementara hubungan struktural antara aktor dapat diukur secara objektif, tindakan harus ditafsirkan dalam konteks spesifik. Dalam penelitiannya tentang kebijakan pengendalian bahan kimia dalam jaringan kebijakan transnasional, Schneider (1988) menyelidiki pandangan semua aktor yang relevan tentang masalah yang dihadapi. Dalam penelitiannya tentang kebijakan pengendalian bahan kimia dalam jaringan kebijakan transnasional, Schneider (1988) menyelidiki pandangan semua aktor yang relevan tentang masalah yang dihadapi. Dia menemukan bahwa pihak-pihak yang berkonflik dapat berbagi pandangan tentang sifat masalah, meskipun mereka berbeda dalam berbagai kepentingan, tujuan kebijakan, sarana, dan keuntungan yang didapat dari institusi.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Schneider, Susan C. 1988. National vs. Corporate Culture: Implications For Human Resource Management. *Journal Human Resource Management*. hal. 235 231-146

## 2.2 Jaringan Aktor

*Actor-Network Theory* dan Cogtain Teori Jaringan Aktor (ANT) dikembangkan oleh ilmuwan studi ilmu pengetahuan dan teknologi studi terutama Michael Callon, Bruno Latoru, dan John Law. Dalam teori jaringan aktor (ANT) terdapat aktor dan jaringan. Aktor adalah semua elemen yang terhubung dalam sistem yang nantinya akan membentuk jaringan secara alamiah.<sup>11</sup> Aktor yang mampu mengontrol aktor lain disebut sebagai aktan. Aktan memiliki kemampuan untuk bergerak masuk dan keluar suatu jaringan berdasarkan kemauan dan kepentingannya. Saat aktan memasuki suatu jaringan, maka jaringan tersebut akan memberi nama atau julukan, aktifitas, perhatian, serta peranan dalam jaringan tersebut. Dengan kata lain, aktan inilah elemen utama dan menjadi penggerak dalam jaringan. Jadi, Actor Network Theory merupakan wacana yang membahas tentang entitas, baik entitas itu berupa manusia maupun bukan manusia (human or non-human). Latour menjelaskan bahwa terdapat karakteristik yang tidak tunggal di antara masing-masing entitas dalam masyarakat. Teori ini memiliki beberapa posisi sentral yang dibahas, yaitu aktor, aktan, translasi, dan intermediari.

Aktor dipahami sebagai pelaku. Aktor dalam melakukan sebuah aksi tidak lepas dari peranan aktor lain. Aktor dalam TJA tidak hanya

---

<sup>11</sup> Indiria Wulandari, "( KAJIAN TEORI JARINGAN-AKTOR MICHAEL CALLON ) Indiria Wulandari Abstrak". 4, 2017, 1-10

entitas manusia, namun juga nonmanusia. Kedua, aktan dipahami sebagai aktor pengendali. Aktan dapat mengendalikan aktor-aktor lain, seperti Tamsil Linrung yang menjadi tokoh dalam penguatan kelembagaan DPD untuk membangun sebuah jaringan antar lembaga. Ketiga, translasi yang merupakan konsep yang memberikan ruang dalam analisis kehadiran jaringan-aktor. Keempat, intermediari, yaitu aktor yang bertindak sebagai penghubung antara pihak aktor atau sekumpulan aktor untuk memelihara relasi di antara mereka. TJA bertindak sebagai alat untuk mengeksplorasi interaksi aktor manusia dan nonmanusia satu sama lain untuk memahami dunia mereka sehingga membentuk suatu jaringan yang stabil/tak stabil dalam jangka waktu tertentu (Lataour dalam Nasution, tersebut berfungsi untuk menunjukkan jaringan-aktor dalam novel Nadira). Untuk mengetahui stabil/tidak stabil jaringan dalam jangka waktu tertentu, TJA menggunakan keempat konsep tersebut, yaitu aktor, aktan, translasi yang terdiri atas empat momen atau tahap, dan intermediari.

Proses translasi menurut Callon melibatkan 4 tahap yang masing-masing disebut dengan tahap problematisasi (problematization), tahap penarikan (interessement), tahap pelibatan (enrolment), dan tahap mobilisasi (mobilization). Keempat konsep, antara lain aktor, aktan, translasi, dan intermediari ditelusuri untuk tujuan dasar TJA, yaitu untuk mengeksplorasi proses jaringan dibangun dan dipelihara (stabil/tak stabil) guna mencapai tujuan tertentu. Jadi, tujuan dari aktivitas analisis

TJA untuk mengungkapkan proses kemenjadian jaringan heterogen (kestabilan atau ketidakstabilan dan keberhasilan/ketidakberhasilan). Analisis difokuskan pada daftar berbagai aktor, sirkulasi di antara mereka, negosiasi, dan pendelegasian aksi-aksi di antara para aktor). Jika semua fokus tersebut dilakukan, akan dihasilkan suatu paparan berupa deskriptif yang mengungkapkan suatu kausalitas kemenjadian jaringan.

## **2.3 Faksionalisasi Partai**

Dewasa ini masalah kelompok-kelompok dan faksi-faksi di dalam partai telah menjadi poin penting. Karena pentingnya masalah ini secara intrinsik dan bagaimana masalah ini telah mengambil bentuk yang sangat tajam, maka masalah ini harus didiskusikan dengan kejelasan yang sempurna. Namun, cukup sering masalah ini dikedepankan dengan cara yang keliru.

### **2.3.1 Definisi Faksionalisasi**

Diterapkan istilah 'faksi' kelompok dengan karakteristik yang sangat berbeda. Dalam kebanyakan kasus, konteks dan ruang lingkup penelitian sebagian besar mempengaruhi definisi dari faksionalisasi. Faksi sebagai kombinasi atau pengelompokan pemilih dan pemimpin politik yang bersatu di waktu tertentu dalam mendukung calon. Selanjutnya, definisi dari faksi cenderung dikaitkan dengan identifikasi kekuatan organisasi. Sebuah analisis

rinci dari faksionalisme partai di pelopori oleh Raphael dan itu analisis konseptual pertama yang menawarkan hipotesis untuk menjelaskan politik faksi menggunakan kerangka kooperatif. Zariski mengembangkan berbagai pendekatan untuk menganalisis kelompok-kelompok intra-partai yang dilabel sebagai faksi dari fungsi struktur dan dampak kelompok politik tersebut. Zariski mendefinisikan faksi sebagai: setiap intra-partai kombinasi, atau pengelompokan yang anggotanya berbagai rasa identitas umum dan tujuan umum dan diatur untuk bertindak secara kolektif sebagai blok yang berbeda dalam partai untuk mencapai tujuan mereka.<sup>12</sup>

Pemahaman zariski tentang faksi jelas menyiratkan tingkat daya tahan tertentu dari organisasi. Dia menunjukkan kebutuhan untuk faksi memiliki identitas umum dan menjadi terorganisir secara kolektif. Kecenderungan ini mengilhami definisi ini berlaku untuk negara-negara dengan sistem politik yang lebih mapan dan pihak yang dilembagakan.

Penafsiran sempit tentang faksi diperkenalkan oleh Nathan yang cenderung mengasosiasikan faksi dengan ikatan-ikatan patron-klien terlepas dari tingkat organisasi. Menggambar dari analisis pengelompokan dalam partai Komunis China, faksi menurut Nathan dapat dianggap sebagai “jaringan pribadi pemimpin individu

---

<sup>12</sup> Bima Arya Sugianto, “Beyond Formal Politics: Party Factionalism and Leadership In post-Authoritarian Indonesia” (Thesis tidak diterbitkan, Department Of Political And Social Change Research School Of Pacific And Asian Studies The Australian Nasional University, 2006) 52.



yang beroperasi pada dasar hubungan klientelis untuk tujuan politik mereka”. Meskipun masalah organisasi, sarjana lain telah mencoba untuk fokus pada dasar kelompok yang terbagi.

Perdebatan lain yang berkaitan dengan aspek-aspek motivasi dari faksi partai adalah apakah faksi dasarnya kelompok ideologis. Pembahasan mengenai faktor ideologis di faksi formasi dasarnya berasal dari gagasan bahwa faksi mungkin memiliki berbagai tujuan, kepentingan daerah atau kelompok, pengaruh pada strategi partai dari pemerintah, dan promosi dari seperangkat nilai diskrit. Dalam banyak kasus, ideologi faksionalisasi menjadi penting dalam pembentukan identitas partai. Ideologi konflik mencerminkan perbedaan pendapat tentang nilai yang ditegakkan. Magone menyatakan bahwa kontroversi ideologi sering didasarkan pada desain politik untuk organisasi internal partai dan sistem politik dimasa depan. Beller dan Belloni hati-hati menentukan faksi sebagai: setiap kelompok yang relatif terorganisir dan yang bersaing dengan rival kekuasaan keuntungan dalam kelompok yang lebih besar dari yang merupakan bagian.

### **2.3.2 Penyebab Faksionalisasi**

Faksionalisasi kepartaian sejatinya merupakan hal umum. biasanya faksionalisasi menjadi masalah serius ketika demokrasi internal dan institusional partai tidak berjalan sehingga terjadi

personifikasi kekuasaan. Dalam konteks internal parpol, penyebab faksionalisme diantaranya kuat dipengaruhi oleh tiga hal. Pertama yaitu ideologi, kedua kepemimpinan partai, ketiga karakter patronase. Pertama dalam konteks ideologi, parpol dengan basis ideologi yang kokoh biasanya memiliki daya tahan yang kuat terhadap perpecahan internal. Sebaliknya, semakin pragmatis karakter partai, semakin rentan pula lah partai tersebut terhadap perpecahan. Kedua, parpol dengan tradisi kepemimpinan yang baik juga lebih siap dalam mengelola benturan politik internal dibandingkan parpol dengan corak kepemimpinan karismatik atau kepemimpinan instan, karena sebagian besar penyebab faksionalisme terkait dengan persaingan dalam merebut kendali politik partai.

Ketiga, faktor internal lain yang sangat mempengaruhi pengelolaan faksionalisme adalah karakter patronase didalam partai. Model patronase politik tradisional dimana hubungan antara patron politik dengan kader-kadernya yang sangat bersifat informal dan personal berpotensi besar mengancam struktur legal formal partai. Karena loyalitas personal justru menjadi lebih menentukan daripada mekanisme formal. Hal ini terlihat dari loyalitas terhadap patron politik lebih kuat daripada loyalitas terhadap *platform* perjuangan partai. Namun sebaliknya dengan model patronase politik yang lebih modern, hubungan patron politik dan kadernya

lebih bersifat organisasional-formal. Patronase model ini lebih sesuai dengan prinsip partai modern dan dapat memiliki fungsi strategis sebagai mesin pembangun institusi partai.

### **2.3.3 Dampak Faksionalisasi**

Faksionalisasi yang berkepanjangan jelas menyebabkan semakin melemahnya konsolidasi organisasi.<sup>13</sup> Para elit parpol saling melemah dan tidak saling mendukung. Implikasi kegagalan mengelola faksionalisme ini, minyalnya, faksi yang terpinggirkan cenderung membentuk parpol baru atau para politikus berpindah ke parpol lain sambil mencaci maki parpol yang pernah dihinggapinya. Parpol gagal menjalankan fungsinya sebagai intermediasi politik akan berimbas terhadap institusi demokrasi (eksekutif-legislatif-yudikatif) dan perilaku elit politi (pejabat publik) yang perekrutannya melibatkan parpol. Karena itu, problem di lembaga legislatif, eksekutif, bahkan yudikatif sejatinya sangat mungkin merupakan imbas dari parpol yang gagal. Jika parpol gagal, maka tentu saja upaya maksimalisasi pelayanan publik menjadi ilusi alias tak pernah terwujud.

---

<sup>13</sup> Bima Arya Sugianto, "Beyond Formal Politics: Party Factionalism and Leadership In post-Authoritarian Indonesia" (Thesis tidak diterbitkan, Department Of Political And Social Change Reaserch School Of Pacific And Asian Studies The Australian Nasional University, 2006) 126.

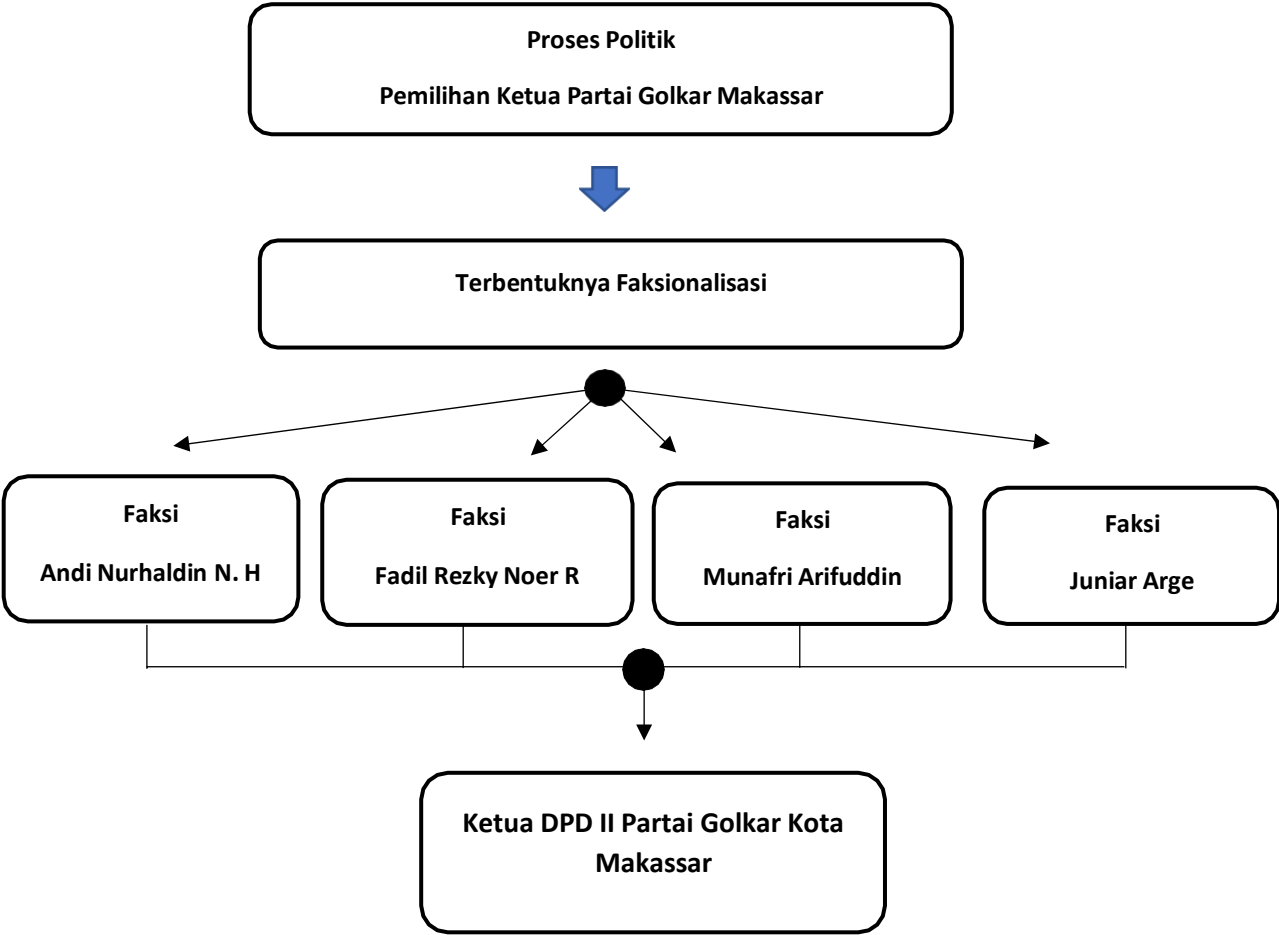
## 2.4 Kerangka Pikir

Sebuah Partai Politik memerlukan yang namanya pemimpin atau ketua. Eksistensi kemajuan sebuah partai ditentukan oleh etos dari ketua Partai. Kegiatan pemilihan ketua partai secara langsung merupakan salah satu wujud dari pelaksanaan kedaulatan suara secara langsung merupakan wujud dari pelaksanaan kedaulatan suara anggota partai dalam rangka penyelenggaraan demokrasi. Sebagai sebuah partai politi, partai Golkar Kota Makassar juga telah melaksanakan pemilihan Ketua DPD Partai Golkar Kota Makassar. Pada pemilihan ini ada empat orang yang mencalonkan diri sebagai calon ketua DPD Partai Golkar Kota Makassar yaitu Andi Nurhaldin N. H, Fadil Rezky Noer R, Munafri Arifuddin, dan Juniar Arge. Namun dari keempat calon tersebut dua diantaranya tidak mengumpulkan formulir pendaftaran, maka dari itu hanya ditetapkan ada dua calon saja yang bertarung merebut kursi DPD Partai Golkar Makassar yaitu Munafri Arifuddin dan Juniar Arge. Namun seiring berjalannya waktu Juniar Arge memutuskan untuk mundur merebutkan kursi DPD Partai Golkar Makassar, sehingga Munafri Arifuddin terpilih menjadi Ketua DPD Partai Golkar Makassar secara aklamasi.

Di dalam pemilihan ketua partai tentu ada yang namanya pengelompokan atau faksionalisasi. Faksionalisasi terjadi tidak hanya disebabkan oleh tiga faktor yaitu ideologi, kepemimpinan partai dan

karakter patronase. Faksionalisasi sebagai kombinasi atau pengelompokan pemilih dan pemimpin politik yang bersatu di waktu tertentu dalam mendukung calon. Faksionalisasi kepartaian sejatinya merupakan hal umum, biasanya faksionalisasi menjadi masalah serius ketika demokrasi internal dan institusional partai tidak berjalan sehingga terjadi personifikasi kekuasaan. Faksi sendiri yang terjadi di Partai Politik, khususnya Partai Golkar Makassar memiliki dampak yang sangat berpengaruh pada saat pemilihan Ketua Partai Golkar Makassar. Faksi-faksi ini terbentuk dari keempat calon ketua yang mencalonkan diri yaitu Faksi Andi Nurhaldin N.H, Faksi Fadil Rezky N.R, Faksi Munafri Arifuddin, dan Faksi Juniar Arge. Ketiga faksi tersebut akhirnya mendukung Munafri Arifuddin terpilih secara aklamasi. Oleh sebab itu pada penelitian ini, peneliti akan menjelaskan mengapa Munafri Arifuddin terpilih menjadi ketua DPD Partai Golkar Makassar serta bagaimana faksionalisasi dalam mendukung terpilihnya Munafri Arifuddin menjadi ketua DPD Partai Golkar Makassar.

**2.5 Skema Pemikiran**



## 2.6 Peneliti Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yahsad Al Farisi dalam penelitiannya yang berjudul Perubahan Strategi Politik Mendorong Faksionalisasi DPD PAN Surabaya dalam Muswil IV DPW PAN Jatim. Jenis penelitian ini merupakan deskriptif, dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sama-sama untuk membahas faksionalisasi yang terjadi dipartai dalam pemilihan ketua partai. Perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah fokus penelitian sebelumnya ialah berfokus pada pecahnya internal partai sehingga memunculkan kubu-kubu, sedangkan pada penelitian berfokus bersatunya kubu-kubu yang awalnya banyak menjadi satu suara.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Firdaus Ali Firmansyah dalam penelitiannya yang berjudul Wajah Faksionalisasi Ditubuh Partai Demokrat. Jenis penelitian ini merupakan deskriptif, dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sama-sama berfokus pada faksionalisasi yang terjadi didalam partai politik. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah lokasi dalam penelitian sebelumnya yakni dipartai demokrat sedangkan dalam penelitian ini berlokasi di partai Golkar.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Singgih Manggalou (2017) dalam penelitiannya yang berjudul Konflik dan Faksionalisasi Elite Partai Golkar Pasca Pilpres 2014. Jenis penelitian ini merupakan deskriptif, dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang faksionalisasi yang terjadi dipartai golkar, serta jenis dan metode pendekatan penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah teori yang digunakan dalam penelitian sebelumnya adalah studi konflik dan faksionalisasi sedangkan pada penelitian ini menggunakan konsep aktor, jaringan aktor dan faksionalisasi partai